



## **KEPUTUSAN**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : HK. 02.01/Kep. 09 -DPRD/2023**

#### **TENTANG**

#### **PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilakan kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal,

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

**ttd**

**AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**ttd**

**ttd**

**ttd**

**SRI PUJI UTAMI**

**NENG SUPARTINI P**

**WARSENO**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR : HK. 02.01/Kep. 09 -DPRD/2023

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TENTANG PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM  
DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT.

---

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola;
  - b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan
  - c. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan disegala bidang kehidupan, sehingga lingkungan hidup perlu dilindungi dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam satu peraturan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analistis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat

pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

21. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
22. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
26. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
27. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
28. Mutu air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
30. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan
31. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah

yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

33. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
35. Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
36. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai pencemar udara yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
37. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
38. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup
39. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
40. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
41. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
42. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
43. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
44. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3
45. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu

- usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3.
46. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  47. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
  48. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen lingkungan hidup.
  49. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang undangan.
  50. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  51. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
  52. Pemrakarsa adalah setiap orang atau perangkat daerah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
  53. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  54. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

### Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Perencanaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pengendalian;
- e. Pemeliharaan;
- f. Hak, kewajiban dan larangan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Sistem informasi lingkungan hidup;
- i. Pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- j. Kerjasama;
- k. Pembinaan dan pengawasan;
- l. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- m. Ketentuan penyidikan;
- n. Ketentuan pidana;

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati bertugas dan berwenang
  - a. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
  - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan RPPLH;
  - d. melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
  - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
  - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
  - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan;
  - j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
  - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - l. mengelola informasi lingkungan hidup;
  - m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
  - n. menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan
  - o. melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan lain dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan penyusunan RPPLH Daerah.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Lingkungan Hidup  
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
- a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

- (3) Inventarisasi lingkungan hidup di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga  
Penyusunan RPPLH Daerah  
Pasal 7

- (1) RPPLH Daerah disusun oleh Bupati.
- (2) RPPLH diatur dengan peraturan daerah.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
  - a. RPPLH Provinsi; dan
  - b. Inventarisasi tingkat ekoregion di daerah
- (4) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah terkait.
- (5) Materi muatan RPPLH daerah meliputi :
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

- (1) RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD.
- (2) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMANFAATAN  
Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan :
  - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
  - b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
  - c. Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Setiap badan usaha dan/atau perorangan yang memanfaatkan sumber daya alam wajib membayar retribusi secara teknis diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB V  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat melaksanakan pengendalian sesuai dengan tugas, kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat menggunakan laboratorium lingkungan daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laboratorium lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua  
Pencegahan  
Paragraf 1  
Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Pasal 12

Instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. persetujuan lingkungan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- i. analisis resiko lingkungan hidup;
- j. audit lingkungan hidup; dan
- k. instrumen lain yang sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 13

- (1) Bupati wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Bupati wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi;
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya , rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme ;
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Penyusunan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tata Ruang  
Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 3  
Baku Mutu Lingkungan Hidup  
Pasal 15

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi :
  - a. baku mutu air;
  - b. baku mutu air limbah;
  - c. baku mutu udara ambien;
  - d. baku mutu emisi;
  - e. baku mutu gangguan; dan
  - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
  - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
  - b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup  
Pasal 16

- (1) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi meliputi kerusakan ekosistem, kerusakan akibat pertambangan,

kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kerusakan akibat perubahan iklim dan kerusakan akibat eksploitasi air tanah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Persetujuan Lingkungan  
Pasal 17

- (1) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL; atau
  - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan.
- (5) Dalam hal perizinan berusaha berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang eksisting.
- (6) Bentuk pengakhiran persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.
- (7) Pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

## Pasal 18

Setiap rencana dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki :

- a. AMDAL;
- b. UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

## Pasal 19

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting dan kriteria usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang, maka dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada pemrakarsa.

## Pasal 21

- (1) Dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan ahli yang bersertifikat.
- (4) Tim uji kelayakan lingkungan hidup bertugas menguji kelayakan AMDAL untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

- (6) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang meliputi:
  - a. yang terkena dampak;
  - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. konsultasi publik.
- (3) Proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan AMDAL yang disusun oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara sertifikasi serta kriteria kompetensi penyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL..
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL.

- (3) Pemenuhan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Berdasarkan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (5) Tata cara penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria UKL-UPL
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
  - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan kedalam Nomor Induk Berusaha.
- (4) Pengintegrasian SPPL kedalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (5) Muatan dan tata cara pengisian formulis SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan usaha Mikro yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan AMDAL.
- (3) Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas pendanaan penyusunan AMDAL atau formulir UKL-UPL.
- (2) Pendanaan operasional tim uji kelayakan lingkungan hidup berasal dari APBD.

#### Pasal 28

Perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Paragraf 6

#### Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f.
- (2) instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
  - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
  - c. insentif dan/atau disinsentif.

#### Pasal 30

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
  - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
  - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.

- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
  - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
  - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk :
  - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;
  - b. pengembangan sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.

Paragraf 7  
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup  
Pasal 31

- (1) Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dialokasikan oleh untuk membiayai:
  - a. Anggaran berbasis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g wajib dialokasi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.

Paragraf 8  
Analisis Resiko Lingkungan Hidup  
Pasal 32

- (1) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h wajib dilakukan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, serta kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan
  - c. komunikasi risiko.

- (3) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Audit Lingkungan Hidup  
Pasal 33

- (1) Bupati mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i secara sukarela dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penanggulangan  
Pasal 34

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, ganti rugi, dan/atau tuntutan pidana.
- (4) Pelanggaran terhadap penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Keempat  
Pemulihan  
Pasal 35

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelanggaran terhadap pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 36

- (1) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
  - a. deposito berjangka;
  - b. tabungan bersama;
  - c. bank garansi; dan/atau
  - d. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin.
- (4) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan.

- (5) Penerapan dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pencemaran Air  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 37

- (1) Penyusunan dan penetapan Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran air;
  - b. penanggulangan pencemaran air; dan
  - c. pemulihan mutu air.

Paragraf 2  
Pencegahan  
Pasal 38

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
  - a. nirtitik; dan
  - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
  - c. penetapan baku mutu air limbah;
  - d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah;

- e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
- f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber air limbah dari:
  - a. rumah tangga; dan
  - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan air limbah dari sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah.
- (2) Hasil pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b;
  - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
  - c. pembuangan ke badan air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 41

Baku mutu air limbah diterapkan pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan :

- a. pembuangan air limbah ke badan air permukaan;
- b. pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu;
- c. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; dan/atau
- d. bentuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 42

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib :
  - a. membuat kajian; atau
  - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah, sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.
- (2) Pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci pelaku usaha dalam kawasan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan, mensyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah pada RKL-RPL rinci.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk menerbitkan persetujuan teknis.

- (3) Tata cara permohonan, penilaian, penerbitan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dalam pemenuhan baku mutu air limbah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. badan usaha; atau
- b. pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis
- (2) verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. melihat antara kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
  - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya baku mutu air limbah.
- (3) hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada (2) adalah memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
  - a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan menerbitkan SLO; atau
  - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai pada baku mutu air limbah terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf b pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan.

#### Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran air;
  - b. pengelolaan air limbah;
  - c. pemantauan air limbah dan mutu air;
  - d. penanggulangan pencemaran air;
  - e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
  - f. penyediaan sarana dan prasarana kedaruratan dalam pengendalian pencemaran air;
  - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian pencemaran air;
  - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran air; dan/atau
  - i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya pengendalian pencemaran air.
- (3) Pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 47

- (1) Sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pebuangan air limbah ke dalam air permukaan mempertimbangkan :
  - a. ketersediaan alokasi beban pencemar air di lokasi pembuangan air limbah; dan
  - b. alokasi beban pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Perdagangan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 48

Perdagangan alokasi beban pencemar air Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

#### Pasal 49

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan hanya dapat membuang air limbah ke badan air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.
- (2) Pelanggaran terhadap pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pelanggaran terhadap pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Air

#### Pasal 50

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. penghentian sumber pencemaran air; dan atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.

- (4) Dalam hal terjadi pencemaran air, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
  - a. lokasi;
  - b. waktu;
  - c. penyebab;
  - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
  - e. upaya telah dilakukan.
- (6) Pelanggaran terhadap penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Mutu Air

#### Pasal 52

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pembersihan unsur pencemar air;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan
  - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pelanggaran terhadap pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak diketahui pencemaran air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 54

Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan jika :

- a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.

#### Bagian Keenam

#### Pengendalian Pencemaran Udara

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 55

- (1) Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU)
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan RPPMU sesuai dengan kewenangannya berdasarkan :
  - a. RPPMU Nasional;
  - b. RPPMU Provinsi; dan
  - c. Nilai konsentrasi udara ambien tertinggi dikelas WPPMU
- (3) Penyusunan dan penetapan RPPMU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2  
Pencegahan  
Pasal 56

Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui penerapan :

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
- e. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
- f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 57

- (1) Baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diterapkan pada :
  - a. sumber emisi tidak bergerak; dan
  - b. sumber emisi bergerak.
- (2) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan dengan :
  - a. dampak emisi rendah; dan
  - b. dampak emisi tinggi.
- (3) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak untuk usaha dan/atau kegiatan emisi rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baku mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Baku mutu emisi sumber emisi tidak bergerak untuk usaha dan/atau kegiatan emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (5) Dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan wajib RKL-RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL-RPL rinci mensyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi pada RKL-RPL rinci.
- (6) Dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh Menteri, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis.
- (7) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan

baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) kepada Bupati melalui sistem informasi lingkungan hidup.

- (8) Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk melaksanakan proses penerbitan persetujuan teknis.
- (9) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
  - a. standar teknis pemenuhan baku mutu emisi;
  - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
  - c. sistem manajemen lingkungan.
- (10) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara untuk :
  - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara yang dilakukan; dan
  - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya baku mutu emisi.
- (2) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendali pencemaran udara berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
  - a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati menerbitkan SLO; atau
  - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai dasar Bupati melakukan pengawasan.

#### Pasal 59

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi:
  - a. produk dari usaha dan/atau kegiatan sektor industri otomotif;
  - b. penggunaan alat transportasi darat berbasis non jalan; dan/atau
  - c. penggunaan alat berat, wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi.

- (2) Setiap orang yang menghasilkan emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan baku mutu emisi.
- (3) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun; dan
  - b. pengukuran dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan ketentuan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 3  
Penanggulangan  
Pasal 60

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
  - b. penghentian pencemaran udara; dan
  - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran udara; dan/atau
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan,

Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.

- (3) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran.

#### Paragraf 4

#### Pemulihan Kualitas Udara

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (3) Biaya pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Pelanggaran terhadap pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengendalian Pencemaran Danau dan/atau Situ

#### Pasal 63

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan mutu danau/situ dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu danau dan/atau situ
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan mutu danau/situ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan
- (3) Bupati melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan mutu danau dan/atau situ melalui :
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pembatasan limbah ke danau dan atau situ;
  - c. pencegahan sampah ke danau dan atau situ; dan
  - d. instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Limbah B3  
Paragraf 1  
Pengelolaan Limbah  
Pasal 64

- (1) setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengelolaan limbah B3;
  - b. pengelolaan limbah non B3.
- (3) Pelanggaran terhadap pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 65

Penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. penyimpanan limbah B3; dan
- b. pengumpulan limbah B3

Paragraf 2  
Penyimpanan limbah B3  
Pasal 66

- (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga
- (3) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
- (4) Pelanggaran terhadap penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau

e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilarang melakukan pencampuran B3 yang disimpannya.
- (2) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:
  - a. standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan kedalam nomor induk berusaha bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
  - b. rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan, bagi :
    1. penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL; dan
    2. instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3.
- (3) Standar dan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. nama, sumber, karakteristik dan jumlah B3 yang akan disimpan;
  - b. dokumen yang akan menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
  - c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
  - d. persyaratan lingkungan hidup; dan
  - e. kewajiban pemenuhan standar dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3.
- (4) Tata cara pengintegrasian standar penyimpanan limbah B3 terhadap nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 68

- (1) Untuk dapat melakukan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib :
  - a. persetujuan lingkungan;
  - b. perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan limbah B3;

- (2) untuk mendapat persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengumpul limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3
- (3) Pengumpul limbah dilarang :
  - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain; dan
  - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (4) Pelanggaran terhadap pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 69

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) pengumpul limbah B3 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menugaskan instansi yang membidangi lingkungan hidup untuk menyelenggarakan pemberian persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai ayat (1).
- (3) Persetujuan teknis pengumpul limbah B3 diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pembangunan fasilitas pengumpul limbah B3 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak selesai pembangunan fasilitas pengumpul limbah B3
- (2) Laporan pengumpulan limbah B3 disampaikan kepada Bupati sesuai dengan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diterbitkan
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 71

- (1) Berdasarkan laporan pembangunan fasilitas pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Bupati melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas pengumpulan limbah B3 :
  - a. sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan SLO kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
  - b. tidak sesuai persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan surat agar pengumpul limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan.
- (3) Penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah verifikasi dilakukan
- (4) SLO untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menjadi dasar dimulainya :
  - a. kegiatan operasional pengumpulan limbah B3;
  - b. pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan berusaha.

## Pasal 72

Pengelolaan limbah yang telah memperoleh persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika dimaksud :

- a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas pengumpul limbah B3; atau
- c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas pengumpul limbah B3.

## Bagian Kesembilan Pengelolaan Sampah Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. Kebijakan Pengelolaan Sampah;
  - b. Strategi Pengelolaan Sampah; dan/ atau
  - c. Program Pengelolaan Sampah.
- (3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.
- (4) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 74

- (1) kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
- a. pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui :
    - 1. efisiensi penggunaan material dalam system produksi dan konsumsi di wilayah daerah;
    - 2. penanganan sampah secara terdesentralisasi;
    - 3. penanganan sampah secara terpilah;
    - 4. pengutamaan pengelolaan sampah untuk daur ulang material; dan
    - 5. meminimalkan penggunaan material toksik pada proses produksi dan konsumsi material.
  - b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
  - c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.
- (2) Selain Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga Menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.
- (3) Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah mandiri.
- (2) Pemerintahan desa dan kelurahan wajib mengelola sampah secara mandiri.

- (3) Pengelolaan sampah mandiri terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sampah dari sumbernya.

BAB VI  
PEMELIHARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 76

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. kualitas dan kuantitas air;
  - b. kualitas udara; dan
  - c. kualitas tanah.
- (3) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :
  - a. konservasi sumber daya alam;
  - b. pencadangan sumber daya alam;
  - c. pelestarian fungsi atmosfer.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan Kualitas dan Kuantitas Air  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 77

Pemeliharaan kualitas dan kuantitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2  
Konservasi Air  
Pasal 78

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi kegiatan;
  - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
  - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
  - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

- meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber daya air yang berfungsi dalam menjaga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
    - a. upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu;
    - b. upaya menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah melalui penghijauan, pembangunan waduk resapan air di daerah imbuhan air tanah;
    - c. pelestarian dan pengawetan sumber daya air;
    - d. mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan air tanah untuk memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. penetapan kawasan resapan air.
  - (4) ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pencadangan Air  
Pasal 79

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan terhadap sumber daya air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
  - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya:
  - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
  - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan Kualitas Udara  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 80

Pemeliharaan kualitas udara dilakukan melalui

- a. konservasi kualitas udara;
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 81

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
  - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
  - c. RPPLH.

Pasal 82

- (1) Pelestarian atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b meliputi ;
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon;
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas terukur, teraporkan dan terverifikasi.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi bahan pencemar ozon (BPO).
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala Daerah.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan Kualitas Tanah  
Pasal 83

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. konservasi secara mekanik;
- b. konservasi secara biologis;
- c. konservasi secara kimia; dan
- d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Pertama  
Hak  
Pasal 84

- (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
  - b. mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau prnanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka;
  - c. melakukan penelitian dan kajian;
  - d. memberikan saran pendapat dan/atau keberatan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - f. melakukan pengaduan dan gugatan apabila mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 85

- (1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. memberikan informasi secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - c. mendukung upaya pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup;
  - d. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan perizinan dan atau peraturan perundang-undangan
- (4) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat sumur resapan dan/atau sumur imbuhan air tanah pada daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau.
- (5) Setiap lembaga pendidikan formal dan non formal wajib menerapkan pendidikan berbasis lingkungan.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 86

Setiap orang dan/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukan B3 yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah negara Indonesia;
- d. memasukan limbah B3 ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui batas baku mutu yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar;
- i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikasi kompetensi;
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi;
- k. melakukan usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah daerah dengan memanfaatkan air tanah dari titik pengembalian di wilayah daerah;

- l. mendirikan bangunan, melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang telah ditetapkan sebagai hutan kota, dan jalur hijau kota.
- m. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa melakukan perizinan.
- n. menangkap ikan dengan racun.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 87

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Peran aktif PPLH masyarakat bertujuan untuk :
  - a. menimbulkan kepedulian masyarakat terhadap PPLH;
  - b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
  - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat;
  - e. mengembangkan dan menjaga nilai budaya kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Peran aktif masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran pendapat;
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
  - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra;
  - e. memberikan pendidikan dan pelatihan oleh kelompok masyarakat.

Pasal 88

- (1) setiap perusahaan yang berdomisili di daerah memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan PPLH yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dalam Bidang PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu;
  - b. penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis rumah tangga;
  - c. pelatihan pengelolaan sampah terpadu; dan/ atau bimbingan teknis usaha pengelolaan sampah terpadu.

- d. pembangunan area hijau;
- e. penanaman pohon dan taman; dan/ atau
- f. kegiatan pelestarian lingkungan yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP  
Pasal 89

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri dari sistem informasi :
  - a. dokumen lingkungan hidup;
  - b. pelaporan persetujuan lingkungan hidup;
  - c. status lingkungan hidup pengelolaan limbah B3;
  - d. peta rawan lingkungan;
  - e. pengawasan dan penerapan sanksi administratif
  - f. informasi lingkungan hidup lainnya.

BAB X  
PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
Pasal 90

- (1) pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan di daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap;
  - a. tanah;
  - b. air;
  - c. udara; dan
  - d. pengukuran pemajanan terhadap biomarker dan dampak kesehatan.
- (3) frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KERJASAMA  
Pasal 91

- (1) Dalam upaya meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan

kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 92

- (1) Bupati menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk melakukan pembinaan kepada :
  - a. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. desiminasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. bantuan sarana dan prasarana;
  - e. program percontohan;
  - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
  - g. penyuluhan;
  - h. penelitian;
  - i. pengembangan;
  - j. pemberian penghargaan; dan
  - k. bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi :
  - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah; atau
  - b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 94

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) berwenang:
  - a. melakukan pemantauan;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. mengambil sampel;
  - h. memeriksa peralatan;
  - i. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi;
  - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) dalam hal melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik negeri sipil
- (3) penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

#### Pasal 95

- (1) Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pengawasan langsung; dan atau
  - b. Pengawasan tidak langsung.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 96

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:
  - a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah; atau
  - b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Bupati dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

## Pasal 97

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berupa :
  - a. Teguran tertulis
  - b. Paksaan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.

## Bagian Kedua Sanksi administratif Pasal 98

Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas :

- a. Berita acara pengawasan; dan
- b. Laporan hasil pengawasan.

## Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

### Bagian Kesatu Umum Pasal 100

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan
- (2) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak bersengketa.

### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan Pasal 101

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang :
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan
  - (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### Pasal 102

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak`
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 103

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyeluruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 104

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) pasal 40 ayat (1), pasal 50 ayat (1) Pasal 60 ayat (1) Pasal 62 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) Pasal 67 ayat (1) pasal 84 ayat (3), Pasal 86 huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 105

Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 106

- (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang lingkungan hidup yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal,

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

**AHMAD SANUSI**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**WAKIL KETUA**

**ttd**

**ttd**

**ttd**

**SRI PUJI UTAMI**

**NENG SUPARTINI P**

**WARSENO**

